

Setelah selesai disusun dan disepakati, Renja Perangkat daerah disahkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Proses inui bertujuan untuk memastikan perencanaan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju tahun 2027, dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Rancangan Rencana Kerja Pembanagaunan Daerah (RKPD) .

Dokumen Renja mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program tahunan SKPD mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026;
2. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.
3. Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-

tahun sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

4. Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
5. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun berkenaan;
6. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang;
7. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Pendapatan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
16. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun

- 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 727);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029
 24. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;
 25. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 26. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 27. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 28. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

29. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 adalah :

1. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan di tahun 2026
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian dalam tahun anggaran 2026; dan
3. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan dalam rangka perencanaan tahun 2026.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran 2026;
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi sumber daya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Asli daerah di tahun 2026 sesuai target sasaran strategis yang telah ditetapkan; dan
3. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Pendapatan daerah antar bidang khususnya dalam menggali sumber -sumber pendapatan daerah berdasarkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

HASIL EVALUSI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya.

Dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah tahun 2024 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran(output), Hasil (outcome), Manfaat (benefit) dan dampak (impacct). Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

CAPAIAN INDIKATOR UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan kategori Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	Kategori	A (80,38)	BB (75,37)	93,77
2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	69.479.876.571	80.087.292.755,80	115,27

B. Evaluasi Program tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 dari 2 (dua) Program, 7(tujuh) kegiatan dan 45 (empat puluh lima sub kegiatan yang telah direncanakan pada Renja tahun 2024 telah tertampung dalam APBD Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 2.1

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME			OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.608.476.220	8.479.623.075,00	91,32	80,38	75,37	93,77%
I	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.813.280	54.802.480,00	98,58	12	12	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	.079.100,00	9.004.000,00	99,17	2	2	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.964.780,00	5.882.780,00	98,63	1	1	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	4.809.600,00	4.762.000,00	99,01	2	2	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.444.400,00	6.395.900,00	99,25	1	1	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3.628.900,00	3.604.500,00	99,33	1	1	100%

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.733.000,00	6.674.500,00	99,13	3	3	100%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.932.800,00	18.478.800,00	97,60	3	3	100%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.744.605.470	7.053.530.056,00	91,08	16	16	100%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.721.374.970	7.030.565.056	91,05	55	55	100%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.772.000,00	3.712.500,00	98,42	1	1	100%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	4.019.000,00	3.978.000,00	98,98	1	1	100%
11	Koordinasi dan Pelakasaan Akuntansi SKPD	3.056.500,00	3.024.000,00	98,94	1	1	100%
12	Koordinasi dan Penyusunan Lapaoran Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.613.000,00	3.581.500,00	99,13	2	2	100%
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.035.000,00	2.010.000,00	98,77	1	1	100%
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.944.000,00	2.925.000,00	99,35	8	8	100%
15	Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	3.791.000,00	3.734.000,00	98,50	1	1	100%
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500,00	3.858.000,00	93,99	4	4	100%

16	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	2.971.000,00	98,87	1	1	100%
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1.099.500,00	887.000,00	80,67	2	2	100%
IV	Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah	31.746.000,00	31.602.000,00	99,55	7	7	100%
18	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	31.746.000,00	31.602.000,00	99,55	7	7	100%
V	Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah	3.019.400,00	2.981.400,00	98,74	7	7	100%
19	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.900.000,00	1.870.000,00	98,42	7	7	100%
20	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1.119.400,00	1.111.400,00	99,29	1	1	100%
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.461.075,00	584.408.494,00	94,34	82	82	100%
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	4.304.000,00	94,74	1	1	100%
22	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99.820.000,00	96.720.000,00	96,89	10	10	100%
23	Fasilitas Kunjungan Tamu	49.437.000,00	20.169.500,00	40,80	32	32	100%
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463.518.000,00	461.834.994,00	99,64	36	36	100%
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.143.200,00	1.380.000,00	64,39	3	3	100%
VI I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.715.000,00	540.259.234,00	91,00	53	53	100%
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.263.500,00	97,56	6	6	100%

		12.570.000,00					
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.600.000,00	57.911.544,00	77,63	4	4	100%
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.605.000,00	35.244.190,00	98,99	35	35	100%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	470.940.000,00	434.840.000,00	92,33	8	8	100%
VI II	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.588.400,00	208.181.411,00	89,12	47	47	100%
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.588.450,00	158.205.661,00	86,17	30	30	100%
31	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kkantor atau Bangunan Lainnya	49.999.950,00	49.975.750,00	99,95	1	1	100%
B	Program pengelolaan Pendapatan daerah	873.496.425,00	832.788.450,00	95,34	69.479.876.571	80.087.292.755	115%
VI II	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	873.496.425,00	832.788.450,00	95,34			100%
32	Perencanaan Pengelolaan Pajak daerah	13.950.000,00	7.822.000,00	56,07	2	2	100%
33	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	244.609.600,00	238.564.200,00	97,53	5	5	100%
34	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	94.142.300,00	86.613.750,00	92,00	6	6	100%
35	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	84.391.025,00	82.496.900,00	97,76	5	5	100%
36	Pendataan dan Pendaftan Objek Pajak daerah	83.188.000,00	81.530.000,00	98,01	12	12	100%

37	Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	18.456.000,00	18.167.200,00	98,44	2	2	100%
38	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.118.500,00	38.553.000,00	98,55	241.353	241.353	100%
39	Penetapan Wajib Pjak Daerah	73.688.000,00	72.239.000,00	98,03	9	9	100%
40	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22.060.000,00	21.607.000,00	97,95	121	121	100%
41	Penelitian dan Verifikasi Data Plaporan Pajak daerah	20.266.900,00	15.002.500,00	74,02	12	12	100%
42	Penagihan Pajak Daerah	115.421.000,00	114.415.500,00	99,13	2	2	100%
43	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	14.528.100,00	13.827.000,00	95,17	25	25	100%
44	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	34.239.000,00	32.510.500,00	94,95	2	2	100%
45	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	15.438.000,00	9.439.900,00	61,15	4	4	100%
46	Elektronifikasi transaksi pemerintah darerah	0	0		1	-	-

Dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja Perangkat daerah tahun 2025 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun sebelumnya.

Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai terlihat pada Tabel T-C 29.

TABEL. 2.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & bProgram.Kegiatan.SubKegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan(Output)/Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d 2029		Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
						Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	Urusan Penunjang										
	Bidang Urusan Pemerintahan : Keuangan										
A	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	Angka		Angka	Angka	Angka	Angka	Angka	Angka	Angka
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran Bapenda	%		%	%	%	%	%	%	%
			500		75	100	100	100	100	175	35,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	10 dokumen	1,00 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	5 dokumen	1,00 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	5 dokumen	1,00 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	5 dokumen	1,00 %
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	5 dokumen	1,00 %
6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	35	Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	15 Laporan	0,43 %

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	%	3	Laporan	15	Laporan	3,00	%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi keuangan Bapenda	500	%	75	%	100	%	100	%	100	%	100	%	91	%	18,20	%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	260	Org/Bln	220	Org/Bln	55	Org/Bln	49	Org/Bln	89,09	%	55	Org/Bln	275	Org/Bln	1,06	%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	dokumen	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	5	dokumen	1,00	%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	dokumen	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	5	dokumen	1,00	%
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	5	dokumen	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	5	dokumen	1,00	%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10	Laporan	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	%	2	Laporan	10	Laporan	1,00	%
13	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	5	dokumen	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	5	dokumen	1,00	%
14	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40	Laporan	32	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100	%	8	Laporan	40	Laporan	1,00	%
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5	dokumen	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	5	dokumen	1,00	%
c	Administrasi Barang Milik Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi BMD Bapenda	500	%	75	%	100	%	100	%	100	%	100	%	78	%	15,60	%
16	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	5	dokumen	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1 00	dokumen	5	dokumen	1,00	%

17	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	%	2	Laporan	10	Laporan	1,00	%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah daerah	persentase capaian target pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan PD	500	%	75	%	100	%	100	%	100	%	12	%	87	%	17,40	%
18	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	%	12	dokumen	24	dokumen	0,40	%
e	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	500	%	75	%	72	%	-	%	-	%	72	%	147	%	29,40	%
21	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	4	paket	1	paket	1	paket	100	%	1	paket	5	paket	1,00	%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50	paket	10	paket	10	paket	10	paket	100	%	10	paket	20	paket	0,40	%
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	160	paket	128	paket	32	paket	32	paket	100	%	32	paket	160	paket	1,00	%
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	laporan	144	laporan	36	laporan	36	laporan	100	%	36	laporan	180	laporan	1,00	%
24	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	15	laporan	12	laporan	3	laporan	3	laporan	100	%	3	laporan	15	laporan	1,00	%
f	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemda	500	%	75	%	100	%	100	%	100	%	53	%	128	%	25,60	%
25	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	30	laporan	24	laporan	6	laporan	6	laporan	100	%	6	laporan	30	laporan	1,00	%
26	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	20	laporan	16	laporan	4	laporan	4	laporan	100	%	4	laporan	20	laporan	1,00	%
27	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	175	laporan	140	laporan	35	laporan	35	laporan	100	%	35	laporan	175	laporan	1,00	%

28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	40	laporan	32	laporan	8	laporan	8	laporan	100	%	8	laporan	40	laporan	1,00	%
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda	500	%	75	%	100	%	100	%	100	%	47	%	122	%	24,40	%
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	150	unit	120	unit	30	unit	30	unit	30	%	30	unit	150	unit	1,00	%
31	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	5	unit	4	unit	1	unit	1	unit	100	%	1	unit	5	unit	1,00	%
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas ASN Bapenda	82,94	%		%	73,85	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen Kepegawaian Bapenda	500	%	21	%	7	%	-	%	-	%	7	%	28	%	5,60	%
	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	35	dokumen	28	dokumen	7	dokumen		dokumen	7	%	7	%	35	dokumen	1,00	%
	Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen		dokumen	1	%	1	%	2	dokumen	0,40	%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	174,45	%	-	%	6,39	%	10,33	%	161,66	%	-	%	-	%	-	%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Objek Pajak Baru	9,65	%			1,70		2,92		172,76							%
	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	25	unit	20	unit	5	unit	5	unit	100	%	5	unit	25	unit	1,00	%